

## Membangun Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa

Bayu Hikmat Purwana<sup>a</sup>, Henri Prianto Sinurat<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Puslatbang PKASN

e-mail : <sup>a</sup> [bayuhtab@gmail.com](mailto:bayuhtab@gmail.com) , <sup>b</sup> [henrisinurat@yahoo.co.uk](mailto:henrisinurat@yahoo.co.uk)

### Abstrak

Desa sebagai unit administrasi terkecil memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat, namun kejelasan pengembangan kompetensi teknis perangkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah ini termasuk keterbatasan kebijakan yang ada dan kebutuhan pelatihan yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan dan kebijakan pengembangan kompetensi perangkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Aparatur desa dalam praktiknya banyak melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Kebijakan standarisasi pelatihan untuk perangkat desa masih sangat terbatas. Kementerian Dalam Negeri merupakan instansi yang diberi tanggung jawab dalam pengembangan kompetensi perangkat desa. Dibutuhkan kebijakan pelatihan yang memungkinkan integrasi berbagai aspek kebijakan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif. Keterlibatan kementerian teknis yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, sangat penting untuk meminimalisir tumpang tindih kewenangan dalam pengembangan kompetensi perangkat desa. Dengan demikian, pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan efektif di tingkat desa dalam mendukung penyelesaian program prioritas nasional.

**Kata Kunci:** desa, pengembangan kompetensi teknis, perangkat desa

## *Building Institutional Capacity and Developing Village Officials Competence to Enhance Public Service Delivery in Villages*

### Abstract

*Villages, as the smallest administrative units, play a crucial role in public service delivery; however, the clarity in developing the technical competencies of village officials still faces various challenges. These challenges include the limitations of existing policies and the varied training needs. This research aims to analyze the institutional framework and policies for developing village officials' competencies. The study employs a qualitative approach with a descriptive method. In practice, village officials often perform tasks typically carried out by Civil Servants. The policy for standardizing training for village officials is still very limited. The Ministry of Home Affairs is the agency responsible for developing village officials' competencies. There is a need for training policies that integrate various policy aspects to create a more effective framework. The involvement of technical ministries, coordinated by the Ministry of Home Affairs, is essential to minimize overlapping authority in developing the competencies of village officials. Consequently, this competency development is expected to support sustainable and effective development efforts at the village level, contributing to the successful implementation of national priority programs.*

**Keywords:** village, technical competency development, village officials.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

## A. PENDAHULUAN

Pelayanan terbaik dari pemerintahan desa bertujuan untuk mencapai standar pelayanan nasional dan mempercepat tercapainya tata pemerintahan yang baik (Ali & Saputra, 2020). Kajian yang dilakukan (Sri Nugroho, 2018) menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang Desa terbit, pemerintahan desa lebih fokus pada pengembangan ekonomi, sementara penguatan lembaga desa masih terabaikan. Masalah dalam pelayanan publik merupakan dampak negatif dari tata kelola pemerintahan desa yang buruk (Ali & Saputra, 2020). Aparatur pemerintah desa perlu meningkatkan SDM mereka agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Andri et al., 2022).

Hingga tahun 2024, Pemerintah Indonesia masih menghadapi persoalan stunting.

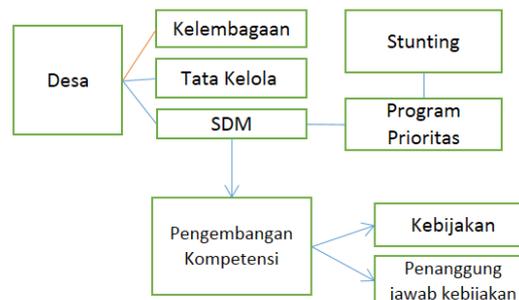
Hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang diumumkan 25 April 2024 bahwa penurunan prevalensi stunting (anak pendek), hanya turun 0,1 persen, dari 21,6% (2022) menjadi 21,5 persen (2023). Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana puluhan triliun rupiah (tahun 2022 sekitar Rp 45 triliun) untuk membiayai program-program stunting (Komsan, Ali, 2024).

Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan terhadap masyarakat, mempunyai peran strategis dalam program pengentasan stunting.

Desa, sebagai unit administrasi terkecil dalam pemerintahan, memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam upaya pengentasan masalah kesehatan seperti stunting. Stunting, atau gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi, menjadi isu penting yang mempengaruhi kualitas generasi masa depan dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi stunting dan memastikan pelayanan yang optimal, diperlukan pengelolaan yang baik dari perangkat desa, yang mencakup tata kelola, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Berdasarkan kajian Akselerasi Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Puslatbang PKASN tahun 2022 ditemukan bahwa dibutuhkan pemenuhan kompetensi untuk perangkat desa (Sinurat et al., 2022). Upaya untuk mempercepat pemenuhan kompetensi perangkat desa diusulkan dengan menggunakan metode pelatihan melalui *learning management system* dan pelatihan berbasis modul.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada keterkaitan antara penguatan kelembagaan, kompetensi SDM, dan efektivitas pelayanan desa dalam memberdayakan berbagai potensi untuk mengatasi stunting. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek administratif dan kelembagaan, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan pengembangan kompetensi mampu menjawab kebutuhan peningkatan SDM perangkat desa dalam menangani masalah kesehatan spesifik, seperti stunting, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**  
Sumber : Olahan Penulis (2024)

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Nasir (2013), metode penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti status suatu kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kategori tertentu pada masa kini, yang didasarkan pada berbagai teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara,

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pengumpulan dokumen, studi pustaka. Wawancara dilaksanakan kepada Perangkat Desa Suci, Kabupaten Garut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Dokumen yang dibutuhkan berkenaan dengan kelembagaan dan pengembangan kompetensi perangkat desa. Studi pustaka dilakukan dengan membangun teori dan dijadikan referensi sebagai dasar penelitian ini. Informasi yang ada dianalisis untuk melihat melihat kelembagaan dan pengembangan kompetensi perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa.

## C. PEMBAHASAN

Aparatur desa merupakan penyelenggara pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika mengacu pada pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, maka pengembangan kompetensi aparatur desa akan mencakup kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa terdiri dari tiga jenjang: sistem/kebijakan, entitas/organisasi, dan individu (Asrori, 2014).

Kompetensi manajerial Perangkat Desa mencakup perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kerja (Indranika et al., 2020). Indikator kompetensi sosio-kultural dapat dilihat dari kemampuan Perangkat Desa dalam mempersatukan masyarakat di tengah kemajemukan, termasuk pengetahuan tentang budaya, penerapan sikap toleransi, dan mewujudkan persatuan serta kesatuan dengan memahami ideologi negara, Pancasila (Indranika et al., 2020). Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur, diamati, dan dikembangkan, serta berkaitan dengan bidang teknis jabatan (Indranika et al., 2020).

Kebijakan standarisasi kompetensi teknis untuk jabatan ASN masih sangat terbatas. Bahkan kebijakan yang mengatur secara

spesifik tentang pengembangan kompetensi teknis saat ini belum *update*. Mengingat jumlah perangkat desa yang cukup banyak, maka dibutuhkan standarisasi pengembangan kompetensi perangkat desa. Di tahun 2023, jumlah desa di Indonesia adalah 83.971 desa. Jika 1 desa mempunyai 10-13 orang perangkat desa, tentunya setiap perangkat desa tersebut membutuhkan pengembangan kompetensi teknis. Sehingga mampu menjalankan tugas dan perannya di pemerintah desa. Jumlah perangkat desa yang banyak juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan kompetensinya.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menyelenggarakan 8 pelatihan untuk pemerintah desa, diantaranya adalah Pelatihan Aparatur Desa, Pelatihan Penguatan BPD, Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa, Pelatihan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa, Pelatihan Penguatan Posyandu, Pelatihan Penguatan PKK, Pelatihan Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pelatihan Aparatur Desa Untuk Penegasan Batas Desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah membangun *Learning Management System* (LMS) yang diberi nama LMS Pamong Desa.

Melalui platform ini, program pelatihan yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah desa, diantaranya adalah Pelatihan Pendayagunaan Data dan Informasi Profil Desa, Pelatihan Pengumpulan, Pengolahan, dan Publikasi Data Profil Desa, Pelatihan Kerjasama Desa, Pelatihan Kelembagaan Desa, dan Pelatihan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi Desa. Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun kurikulum yang mencakup jenjang pelatihan dasar, lanjutan, pengkayaan materi atau tematik, hingga tingkat supra desa.

Kebutuhan kompetensi teknis bagi perangkat desa bersifat dinamis dan bervariasi. Salah satu strategi menilai kebutuhan kompetensi teknis bagi perangkat desa melalui berbagai program pemerintah yang perlu dikawal oleh aparatur desa, seperti program pengentasan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

kemiskinan dan penurunan (prevalensi) stunting sebagai program prioritas nasional.

Penanganan stunting di wilayah (desa) di bawah kendali pemerintahan Kabupaten/Kota melibatkan Puskesmas, Posyandu, Kelompok PKK, Kelompok Karang taruna, Pengurus RT dan RW, serta simpul-simpul kelompok sosial lainnya yang ada di masyarakat. Sudah barang tentu, pelaksanaannya tentu perlu didampingi oleh aparatur desa yang memiliki pemahaman komprehensif dan kapasitas teknis terkait kebijakan penanganan penurunan stunting dari instansi teknis terkait.

Idealnya, setiap kompetensi teknis yang diperlukan harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang, baik yang bersifat spesifik maupun generik, untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat desa. Variasi dan jumlah kebutuhan kompetensi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan, agar mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa di lapangan.

Untuk meningkatkan kompetensi teknis perangkat desa, dapat didukung dengan kebijakan pelatihan dan penanggung jawab kebijakan pelatihan yang jelas.

## a. Kebijakan Pelatihan

Aparatur desa dalam praktiknya banyak melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan kebijakan pelatihan yang secara khusus disusun untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur desa secara terstruktur. Untuk mencapai penyempurnaan kebijakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis perangkat desa, diperlukan pendekatan komprehensif dan inovatif. Pendekatan ini akan mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi teknis perangkat desa, sehingga

menciptakan kerangka pelatihan yang lebih koheren dan terpadu.

Langkah-langkah teknis yang perlu diambil untuk mendukung penyempurnaan ini meliputi beberapa tindakan penting. Pertama, dilakukan review terhadap kebijakan pengembangan kompetensi teknis yang ada saat ini, dengan tujuan mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, bersama dengan para pemangku kepentingan terkait, dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan atau tren yang akan muncul dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis di lingkup pemerintahan desa. Ini juga mencakup perumusan klasifikasi atau perumpunan pengampunan kompetensi teknis yang sesuai dengan perkembangan tersebut.

Selain itu, pengaturan juga perlu mencakup pengembangan media dan bahan ajar yang efektif, penentuan durasi waktu yang optimal untuk penyelenggaraan pelatihan, serta kewenangan pembinaan dan pengelolaan tenaga pelatihan, serta sistem evaluasi dan sertifikasi yang terintegrasi. Dengan kebijakan yang tepat, perangkat desa akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan desa.

## b. Penanggung Jawab Kebijakan

Penyempurnaan kebijakan diklat untuk perangkat desa sangat penting. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis perangkat desa agar mereka lebih siap dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa, yang diharapkan akan berdampak untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Peran penanggung jawab dalam kebijakan ini sangat penting. Karena penanggung jawab kebijakan penyelenggaraam pengembangan kompetensi akan menentukan arah, substansi, dan kontrol kualitas capaian hasil pengembangan kompetensi. Penanggung jawab utama dalam penyempurnaan kebijakan pengembangan kompetensi teknis perangkat desa adalah pemerintah pusat.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Kewenangan tersebut dapat dijalankan oleh kementerian teknis terkait. Pemerintah pusat, melalui kementerian yang berwenang, bertugas merumuskan kebijakan dan standar yang harus diikuti oleh seluruh perangkat desa. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan panduan dan dukungan teknis yang diperlukan. Kementerian yang mempunyai mandat dalam pengembangan kompetensi teknis perangkat daerah, diharapkan juga untuk menyusun instrument dan pengukuran kompetensi teknis perangkat daerah.

Kementerian Dalam Negeri mempunyai peranan dalam pengembangan kompetensi perangkat desa. Namun untuk pengembangan substansi kompetensi teknis secara spesifik, idealnya melibatkan kementerian teknis terkait. Sehingga dalam penyelenggaraannya akan berjalan secara terarah dan komprehensif. Kompetensi teknis yang dibutuhkan perangkat desa tentunya mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam menjawab tantangan yang dihadapi, serta menyesuaikan dengan kondisi desa.

Kompetensi teknis saat ini yang urgen dibutuhkan perangkat desa adalah kemampuan dalam pengentasan stunting. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan kolaborasi untuk menyediakan pedoman, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh perangkat desa untuk mengatasi masalah stunting di lingkup desanya. Dengan keterlibatan Kementerian Kesehatan, pelaksanaan program pengentasan stunting akan lebih terarah dan efektif, memastikan perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk mendukung kesehatan masyarakat desa.

Kementerian Dalam Negeri menjadi leader untuk menginisiasi melakukan pemetaan peran dan tanggung jawab kementerian terkait sesuai bidang kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM perangkat desa dalam mendukung penyelesaian program prioritas pembangunan nasional.

## D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis penelitian, diperlukan penyempurnaan kebijakan pengembangan kompetensi yang mendukung peningkatan kompetensi teknis perangkat desa. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memungkinkan integrasi berbagai aspek kebijakan, dengan dukungan peran penanggung jawab yang jelas, terutama di tingkat pemerintah pusat atau kementerian/lembaga terkait. Dengan adanya kementerian atau lembaga yang ditunjuk, diharapkan arah, cakupan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif.

Keterlibatan kementerian teknis sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, sehingga identifikasi kebutuhan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis perangkat desa dapat relevan dengan kebutuhan faktual. Keberadaan penanggung jawab ini juga akan meningkatkan kompetensi teknis perangkat desa melalui pengembangan media dan bahan ajar, akreditasi pelatihan, serta sistem evaluasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pengembangan kompetensi teknis perangkat desa akan lebih efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4). <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Andri, A., M, S., Desco, D., Ramadhanti, R., Emharis, E., Muharam, S., Sumarli, H., & Hendri, M. (2022). Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2). [https://doi.org/10.36378/bhakti\\_nagori.v2i2.2744](https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2744)

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Anwar, S., Trilestari, E. W., & Agustina, I. (2022). The Tourism Development Policy in Bandung Regency: A Study on Kampung Gamis Soreang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19(1), 112 - 121. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.859>
- Asrori. (2014). Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus Capacity Forces Village Village In The Implementation Of Government In The District Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 6(2).
- Fitriani, L., Kurniawan, I. (2022). Hubungan Gaya Kepemimpinan Parental Terhadap Kinerja Pegawai Pada Instansi Pemerintah Di Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 6 (1), 274-279.
- Fitriani, L., Kurniawan, I., Ahmad, F. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Desa dengan Pembuatan Klaster di Wilayah Kabupaten Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 23 (2), 151 - 178. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v23i2.202>
- Fristasya, A., Supriatna, M.D. (2024). Pengembangan Standar Kompetensi Jabatan Sales Marketing Pada Perusahaan Dagang Kain PT X. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 8, No. 2, 1 - 8.
- Harahap, A., Zulvia, P. (2021). Klasterisasi Desa dengan Menggunakan Algoritma K-Means pada Data Potensi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 237 - 246. <http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3724>
- Kurniawan, I., Asri, M.D., Fitriani, L., Priatna, R. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Rancakalong. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4 (2), 73-83. <https://doi.org/10.31113/setiamenga-bdi.v4i2.50>
- Indranika, D. B., Puspita, D. R., & Faozanudin, M. (2020). Kompetensi Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(1). <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3217>
- Komsan, Ali. (2024). Rendahnya Penurunan Stunting. *Detik.Com*.
- Listiani, T., Salsadila, D. A., Pradesa, H. A., & Maasir, L. (2023). Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Berdasarkan Analisis Kesenjangan Kompetensi Marketing Executive Di PT Pegadaian Kantor Wilayah X. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5848-5859. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3111>
- Mashur, S., Giyanto, B., & Sutrisno, E. (2023). Competence-based recruitment of non civil servant state employees for the internal security division, secretariat general of the house of representatives of the republic of indonesia. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(01), 86-97. <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7605>
- Nasir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33-40. <https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Putranto, R.A., Andikaputra, F.A.T., Pradesa, H.A., Priatna, R. (2022). Meningkatkan komitmen bagi Aparatur Sipil Negara: Perspektif teori pertukaran sosial dalam akuntabilitas organisasi publik. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2), 915 - 926. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1748>
- Simarmata, N.Y., Sutrisno, E. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikz Melalui Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 2, 37 - 48.

- Sinurat, P. H., Nugroho, S. C., & Kencana, A. M. (2022). *Policy Brief Akselerasi Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa*.
- Sofiani, N.F., Supriatna, M.D. (2023). Village Administrators' Quality of Work: Evaluation and Improvement. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol. 7, No.1, pp. 1 – 10.
- Sofiani, N.F., Supriatna, M.D. (2023). Improvement Strategy to Increase Village Administrator Quality of Work. *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, pp. 137 – 143.
- Sri Nugroho, H. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Journal of Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3025>
- Sutrisno, E. (2020). Civil servants management reform in west java province: A case study. *Jurnal Good Governance*, 16 (1), 1 – 7.
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Turiasih, E. , Asropi, A., & Sutrisno, E. . (2024). Competency Development for Animal Handlers : Human Resource Perspective . *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 5(2), 1406–1422. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i2.4893>
- Wijaya, N.P., Supriatna, M.D. (2023). The Implementation of Kirkpatrick Evaluation Model in Financial Management Training. *Enrichment: Journal of Management*, Vol. 12, No. 5, pp. 3506-3514.
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEBD)*, 5 (1), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>
- Zulvia, P., & Harahap, A.S. (2023). Advokasi Digitalisasi Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Cibodas Lembang Sebagai Desa Digital. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 518-525. doi:<https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2501>